



**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BURU**

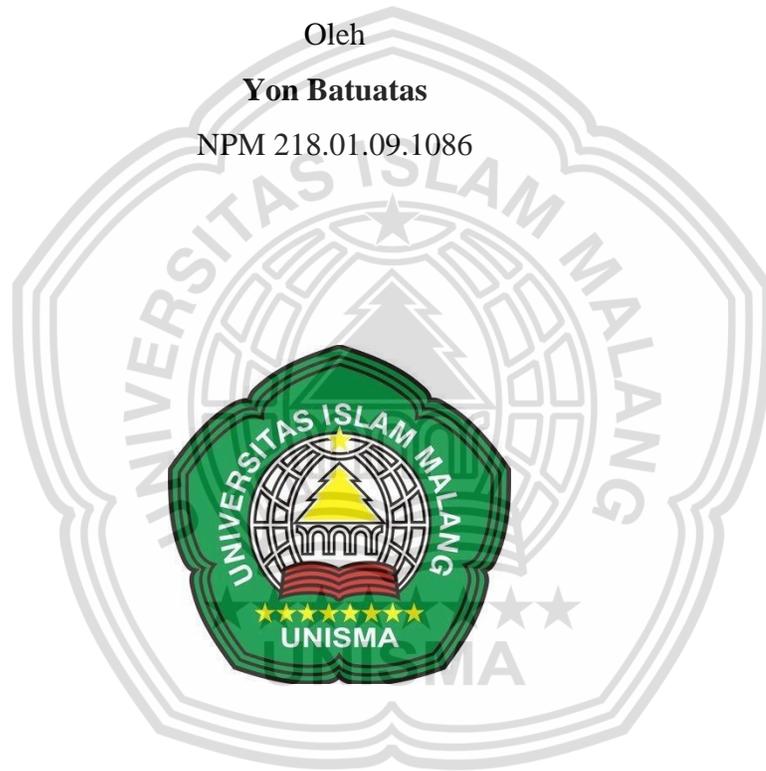
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

Yon Batuatas

NPM 218.01.09.1086



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

2024

ABSTRAK

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru memberikan kontribusi positif yang substansial terhadap peningkatan efisiensi dan akurasi dalam manajemen data penduduk. Dengan memungkinkan proses perekaman, pemutakhiran, dan pengelolaan data kependudukan secara terintegrasi, risiko kesalahan manual dapat diminimalkan.

Sistem ini, pertama-tama, mengakselerasi proses pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran dan kematian. Keberadaannya mereduksi waktu tunggu serta meningkatkan kualitas respons terhadap kebutuhan masyarakat, menciptakan lingkungan administratif yang lebih efisien.

Kedua, melalui integrasi data penduduk, sistem ini memberikan pandangan menyeluruh terhadap profil penduduk di Kabupaten Buru. Informasi ini berpotensi menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan yang lebih terarah, alokasi sumber daya yang efektif, dan perumusan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

Ketiga, implementasi ini juga membawa peningkatan signifikan terhadap keamanan data penduduk melalui penerapan kontrol akses dan backup berkala. Tindakan ini memberikan perlindungan terhadap informasi sensitif dan mengurangi potensi risiko kebocoran atau manipulasi data.

Dengan demikian, implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru bukan hanya memperbaiki efektivitas pengelolaan data penduduk, tetapi juga menciptakan lingkungan administratif yang lebih responsif, terarah, dan aman.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, SIAK.



ABSTRACT

The implementation of the Population Administration Information System at the Population and Civil Registration Office of Buru District makes a substantial positive contribution to improving efficiency and accuracy in population data management. By enabling integrated processes of recording, updating, and managing population data, the risk of manual errors can be minimized.

Firstly, this system accelerates the processes of population administration services, such as the issuance of birth and death certificates. Its presence reduces waiting times and enhances the quality of responsiveness to the needs of the community, creating a more efficient administrative environment.

Secondly, through the integration of population data, this system provides a comprehensive view of the population profile in Buru District. This information has the potential to serve as a foundation for more targeted development planning, effective resource allocation, and the formulation of more precisely targeted public policies.

Thirdly, this implementation also brings a significant improvement in the security of population data through the implementation of access controls and regular backups. These measures provide protection for sensitive information and reduce the potential risks of data leakage or manipulation.

Thus, the implementation of the Population Administration Information System at the Population and Civil Registration Office of Buru District not only enhances the effectiveness of population data management but also creates an administrative environment that is more responsive, directed, and secure.

Keyword: Policy implementation, Population Administration Information System, SIAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan populasi jumlah penduduk yang relatif mengalami peningkatan. Aspek demografi negara menjadi salah satu tolak ukur persebaran penduduk yang tidak merata. Tidak merata persebaran penduduk menimbulkan potensi adanya masalah yang mengharuskan pemerintah dengan bijak secara optimal menyikapi dan membuat suatu kebijakan. Berdasarkan pertumbuhan penduduk yang peningkatannya sangat besar dan tidak merata persebarannya bukan saja menjadi masalah tetapi disertai dengan kualitas penduduk yang minim merupakan sebuah masalah terkait kependudukan di Indonesia.

Peranan penting negara terkait masalah kependudukan bukanlah hal yang mudah, karena hak-hak administratif dimulai dari tersedianya data-data dan tiap kebijakan yang telah ditetapkan untuk kepentingan publik merupakan bagian pokok dan peran dari negara terkait masalah kependudukan. Masalah kependudukan ini menuntut akuntabilitas dan kinerja kepada perangkat yang terkoridor, baik tingkat pusat maupun sampai pada skala kedaerahan dalam proses pengumpulan dan ketersediaan data penduduk sebagai informasi untuk standarisasi administrasi kependudukan. Berdasarkan atas penjelasan sebelumnya mengenai konstruksi kependudukan untuk mewujudkan legalitas status kependudukan, dalam membangun administrasi kependudukan harus ada sistem dan tatanannya yang terkait dengan administrasi negara dengan upaya mendistribusikan regulasi dan kepastian hukum yang

terjamin agar penduduk dari kewenangan pemerintah mampu memberikan eksistensi dan hak untuk penduduk.

Hak individu penduduk perlu mendapat perlindungan dari pemerintah dengan memberikan pelayanan publik yang pasti seperti penerapan dibuatnya dan atau diterbitkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanada Penduduk (KTP), Nomor Induk Penduduk (NIK), dan berbagai status legal yang lain misal akta-akta dari catatan sipil, salah satunya Akta Kelahiran. Dilihat dari perkembangan dan kemajuan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan. Sehingga potensi untuk tindakan kriminal atas status setiap individu kerap menimbulkan penyimpangan seperti pemalsuan identitas yang sangat meluas mengenai dokumen identifikasi kependudukan (misalnya, Paspor, KK, KTP dan lain-lain) untuk kepentingan tertentu. Dengan permasalahan yang terjadi harus ada sistem yang dapat menata kembali apa yang telah direncanakan terkait pelayanan publik agar dapat berjalan dengan baik dan teratur administrasi kependudukannya dengan capaian mengsosialisasikan sistem administrasi kependudukannya dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dengan demikian agar memudahkan penyelenggaraan administrasi kependudukan perihal pengumpulan dan mengelolah data penduduk yang mengikuti perkembangan zaman harus berbasis kepada teknologi dan informasi. Pemerintah pusat dengan adanya permasalahan yang terjadi telah mempersiapkan sebuah sistem yang diberi nama Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem ini secara hukum sudah ditegaskan dalam pengukuhan keputusan presiden Nomor 88 Tahun 2004 mengenai Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. SIAK lebih progres lagi dalam mengelola data kependudukan dengan sistem informasi berbasis web, esensinya sudah berdasarkan prosedur dan standarisasi yang lebih spesifik dengan arah yang lebih tepat sehingga mampu



memberikan pemetaan dalam sistem administrasi dibidang kependudukan dengan unsur ketercapaian yang lebih stabil tentang administrasi serta dapat membantu aparat pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dalam mengupayakan optimal terhadap layanan kependudukan. SIAK pada saat dibuat oleh pemerintah pastinya telah memiliki uji standar dan tingkat kinerja yang diharapkan dapat membantu dalam pelayanan data kependudukan dengan hadirnya sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Pengelolaan yang terlihat beda dari sebelumnya dengan lebih memakai pendekatan informasi teknologi (IT) yang datanya bisa diraup secara online dan lebih bermanfaat, sehingga kelemahan-kelemahan pengolahan data dari segi konvensional dapat ditekan.

Manfaat dari SIAK sendiri dalam pengelolaan data kependudukan sangat mutakhir dan lebih efektif dengan hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik dapat digunakan sebagai proyeksi merumuskan dan memaksimalkan kebijakan, arah formatur dan program terhadap penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dibidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya. Sistem administrasi merupakan bagian turunan subsistem dari sistem administrasi negara yang berguna dalam membantu keselarasan pemerintah dalam membangun terwujudnya proses pelayanan yang baik sehingga tidak terjadinya kecemasan publik terhadap pemerintah atas dasar administrasi negara sebagai bahan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan terhadap tujuan yang telah direncanakan. Status hak administrasi setiap penduduk dibidang pelayanan administrasi kependudukan terkait bagian yang berpartisipasi dalam implementasi masalah pemenuhan data statistik kependudukan baik secara nasional, regional dan lokal serta mampu berkontribusi membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem administrasi

kependudukan agar dapat mampu meningkatkan pelayanan publik yang padu, baik tanpa adanya ketimpangan dan diskriminasi terhadap penduduk.

Status administratif tiap penduduk harus diberikan hak dengan standar yang kejelasan legalitas yakni berupa nomor induk yang terdaftar melalui pengumpulan data baik pusat maupun daerah yang lebih transparan agar dapat diakses oleh masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 13 tentang Nomor Induk Kependudukan maka pemerintah dalam hal ini sebagai promotor menerbitkan sebuah pembaharuan kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2012 yang memuat tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 13 tentang Nomor Induk Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang tertuang dalam PP Nomor 102 Tahun 2012 serta memuat tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam proses realisasi dari sistem ini Kabupaten Buru merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berkenaan dengan berpartisipasi melanggengkannya. Dilihat dari letak demografi negara yang dimana Kabupaten Buru masih tertinggal jauh dalam upaya memetakan situasional kependudukan. Sistem ini sangat membantu upaya pemerintah Kabupaten Buru dengan menangani permasalahan yang terjadi. Ketidakberaturan proposisi tiap-tiap daerah di Kabupaten Buru membuat kefokusannya pemerintah terkait komposisi penduduk dimulai dari kepadatan penduduk yang berkelanjutan serta melonjaknya angka kemiskinan yang dihadapi penduduk pelosok sebagai dasar acuan melihat perkembangan

pemerintah dalam mengatasi masalah di Kabupaten Buru. Tidak mudah menjalankan upaya ini tanpa adanya sistem yang terkoridor sehingga sebuah keharusan berkoordinasi dengan dinas yang bersangkutan.

Upaya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan merealisasikan layanan administrasi kependudukan dengan memberikan Nomor Induk Penduduk yang telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan mobilisasi kebijakan yang terkoridor dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar menuntaskan masalah penduduk berdasarkan aktualisasi proyeksi pembangunan yang berfokus kepada daerah-daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh John Fredi Purba (2009) Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Kota Medan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, metode pencatatan dan dokumentasi sehingga hasilnya banyak data penduduk yang belum terverifikasi dan belum terdaftar didalam kepemilikan Nomor Induk Penduduk, sedangkan yang terjadi di Kabupaten Buru terdapat kasus yang serupa dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Penduduk yang berdampak untuk kebutuhan subsidi yang diberikan oleh pemerintah masih terbilang belum maksimal, sebab banyaknya masyarakat yang diresahkan dengan tidak adilnya pemerintah dalam memberikan subsidi dan ini menjadi masalah yang berkaitan dengan belum merata status hak administratif penduduk yang berada di Kabupaten Buru. Dilihat dari apa yang terjadi dari segi kuantitas penduduk bukan hanya daerah pelosok, akan tetapi banyak pula masyarakat yang keberadaannya dalam kota/kabupaten Buru sendiri masih belum terjangkau dan merasakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah yakni subsidi bantuan sosial dan lebih prihatin lagi terkait masalah pelayanan dibidang pendidikan dan

kesehatan. Dengan demikian akuntabilitas dari pemerintah dalam hal memberikan pelayanan belum tercapai karena standarnya yang belum optimal.

Menarik sekali untuk ditinjau lebih dalam apa yang dijelaskan dari pembahasan, sehingga penulis/peneliti ingin memiliki daya keingintahuan yang lebih untuk meneliti tentang penerapan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara langsung dari beragam aktualisasi dilapangan meliputi langkah, metode, tahapan, manfaat, permasalahan dan data objektif yang diperoleh dari masyarakat setempat Sehingga penulis melihat dari permasalahan yang terjadi membuat keputusan untuk mengangkat topik ini kedalam sebuah penelitian yang berjudul

“Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buru”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam hal ini sangat mengacu kepada latar belakang yang mendeskripsikan masalah-masalah dihadapi serta inti fenomena yang akan diteliti. Berdasarkan penjelasan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini ialah, untuk:

1. Untuk mengetahui proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buru.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Secara teoritis, agar mampu menambah wawasan dan pengetahuan terhadap penulis dan pembaca tentang konsep dasar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- b. Secara praktis dari penelitian ini diharapkan agar bisa dijadikan bahan interpretasi dan penambahan masukan atau kontribusi yang berharga, guna dipakai sebagai bahan perbaikan dan perbandingan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya untuk melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan acuan teori yang telah dibuktikan secara ilmiah melalui prosedur penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK pada penelitian ini difokuskan pada empat dimensi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

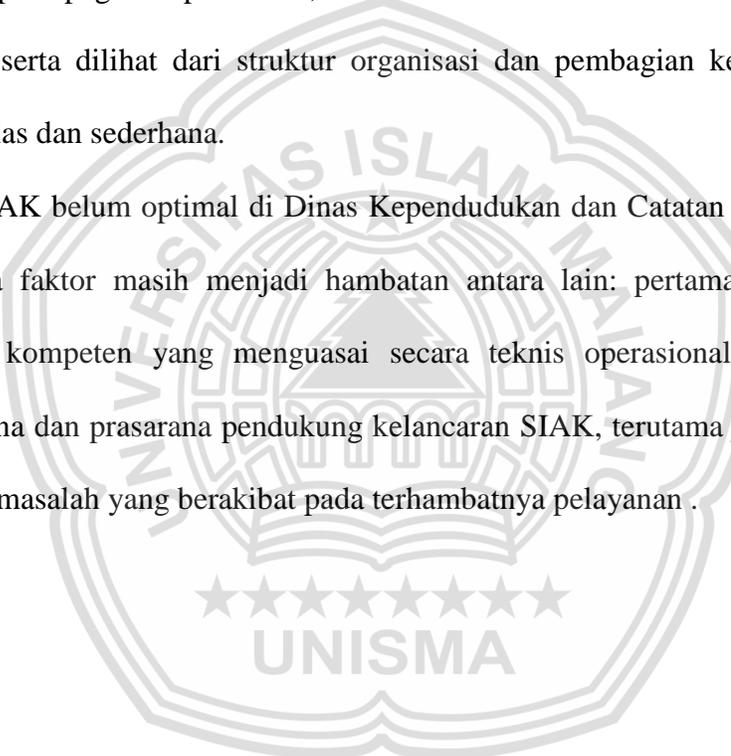
1. Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK dilaksanakan dengan baik dan efektif. Kebijakan SIAK disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung oleh tim yang turun langsung ke masyarakat maupun melalui bantuan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, melalui papan informasi di kantor Dinas, dan melalui brosur atau leaflet, media elektronik seperti website, situs internet, serta informasi dan penjelasan lisan oleh petugas disaat masyarakat melakukan urusan pelayanan di kantor Dinas.

Sumberdaya manusia pegawai untuk pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK secara kuantitas masih kurang memadai, namun secara kualitas sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK cukup memadai dilihat dari dana/biaya operasional yang dialokasikan, namun sarana dan prasarana kerja masih kurang memadai untuk pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK secara prima.

Disposisi (sikap pegawai) dalam melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK sudah cukup baik dilihat dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis dalam melaksanakan pelayanan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK.

Skrutktur birokrasi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK sudah tertata dengan baik dan efektif dilihat dari mekanisme pelayanan yang mempunyai SOP (Standard Operating Procedur) yang jelas, sistimatis dan mudah dipahami oleh para pegawai pelaksana, serta mudah diikuti/dilakukan oleh masyarakat yang dilayani, serta dilihat dari struktur organisasi dan pembagian kerja yang tertata dengan baik, jelas dan sederhana.

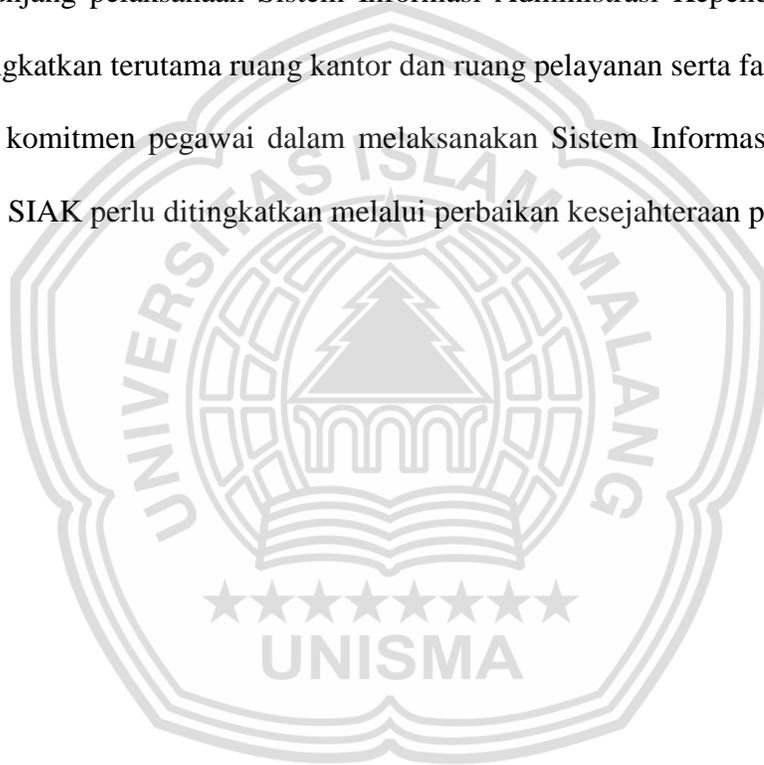
2. Pelaksanaan SIAK belum optimal di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru, beberapa faktor masih menjadi hambatan antara lain: pertama, masih kurang pegawai yang kompeten yang menguasai secara teknis operasional SIAK. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran SIAK, terutama jaringan internet yang sering bermasalah yang berakibat pada terhambatnya pelayanan .



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK hendaknya lebih banyak dilakukan secara langsung kepada masyarakat.
2. Kualitas SDM pegawai Dinas perlu ditingkatkan melalui diklat teknis di bidang sistem informasi administrasi/manajemen. Sarana kerja juga perlu disediakan secara memadai. Prasarana penunjang pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK juga perlu ditingkatkan terutama ruang kantor dan ruang pelayanan serta fasilitasnya.
3. Konsisten dan komitmen pegawai dalam melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK perlu ditingkatkan melalui perbaikan kesejahteraan pegawai.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2008. *Standar Operasional Prosedur. (SOP)*.
- Agustino. 2008. *Struktur Birokrasi*.
- Akib, H. (2012). *Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*.
- Alemina, 2020. *Pengantar Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: ANDI OFFSET (Anggota IKAPI).
- Aos & riwanti, 2019.
- Anwar. 2004. *Pengertian Informasi*.
- Anwar. 2004. *Pengertian Sistem*.
- Aos dan Riwanti. 2019. *Pelaksanaan Sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon*.
- Azhar Susanto. 2013. *Pengertian Informasi*.
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi) Yogyakarta: Media Pressindo.
- Cahyaningtyas, R., & Iriyani, S. (2014). *Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Pada Smp Negeri 3 Tulakan, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*. IJNS-Indonesian Journal on Networking and Security, 4(2).
- Ghoni dan Almansyur. 2012. *Pengumpulan Data Ida Bagus Mantra*. 2009. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset Indiahono. 2009. *Struktur Birokrasi*.
- Imaniawan, F. F. D., & Wati, F. F. (2018). *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Pada Desa Bogangin Sumpiuh*. IJNS Indonesian Journal on Networking and Security, 7(3).
- John Fredi Purba. 2009. *Lokasi Penelitian Meyer dan Grandwood*. 1984. Instrumen Penelitian.
- Miles dan Huberman. 1984. *Analisis Data Kualitatif*.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta: UI Press
- Moeloeng. 2001. *Teknik Analisis Data*.
- Moleong. 2001. *Keabsahan Data*.



DAFTAR PUSTAKA

Moelong. 2001 Triangulasi.

Moleong. 2005. *Fokus Penelitian*.

Panji Afandi dan Ghina Fitri Ariesta Susilo. 2021. *Analisis efektifitas sistem informasi manajemen penerimaan pengelolaan permohonan administrasi kependudukan (SIMP3AK) pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Magelang*.

Pawito. 2007. *Analisa Data Kualitatif*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 1*

Peraturan Pemerintah (PP) No.102 Tahun 2012 tentang *pelaksanaan undang-undang No.24 Tahun 2013 mengenai setiap orang dilarang memerintahkan atau memfasilitasi atau melakukan manipulasi data kependudukan atau elemen tata penduduk*.

Raisa Rafifiti Choerunnisa & Rosinta. 2021. *Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) melalui penggunaan system informasi administrasi kependudukan (SIAK) di pemerintah Kota Cimahi*.

Singarimbun, Masri. (2003). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Sudariyanto. 1990. *Uji Kredibilitas*.

Sugiyono. 2008. *Uji Tranferabilitas*.

Sugiyono. 2008. *Uji Dependabilitas*.

Sugiyono. 2008. *Uji Konfirmabilitas*.

Sugiyono. 2009. *Sumber Data*.

Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sukoharsono, 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Malang: Surya Pena Gemilang

Sutabri Tata, 2016. *Sistem Informasi Manajemen*, Andi Offset, Yogyakarta.

Syafiie. 2011. *Pengertian Sistem*.

Syaukani, Gaffar, dan Rasyid. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*.

Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik*.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Pasal 13 tentang nomor induk kependudukan.

Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 (1)

Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Pasal 1 (21) tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Wahab. 2008. *Kebijakan Publik*.

